



[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](#)

Upaya Bela Negara Dalam Perang Informasi Hoaks Vaksinasi Tenaga Medis Di Era Digital

Zelinda Noorsyahbani¹, Alfizar Daffa Zulkarnain¹, Ni Kadek Ayu Ananda Putri Pertiwi¹, Made Erika Dharmayanti Widyaningrum¹, Risma Fitriani¹.

¹Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Mataram, Indonesia, zelinda076@gmail.com.

Abstrak: Artikel ini mengkaji upaya bela negara dalam perang informasi melawan hoaks vaksinasi yang melibatkan tenaga medis di era digital. Penyebaran informasi palsu tentang vaksin yang dipercepat oleh teknologi dan media sosial melemahkan kepercayaan publik, meningkatkan keraguan terhadap program imunisasi, dan mengancam ketahanan nasional di bidang kesehatan dan informasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bahaya hoaks vaksinasi terhadap ketahanan nasional, menelaah peran strategis tenaga medis dalam edukasi dan literasi digital kesehatan, serta mengkaji kontribusi kebijakan dan penegakan hukum pemerintah dalam pengendalian informasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kelembagaan, dan artikel ilmiah terkait hoaks vaksinasi, bela negara, dan literasi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa tenaga medis menjadi garda terdepan melalui diseminasi informasi berbasis bukti, promosi kesehatan lintas platform digital, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, sedangkan pemerintah memperkuat perlindungan ruang digital melalui regulasi, sanksi, pemblokiran konten bohong, dan penguatan keamanan siber berlandaskan prinsip keadilan restoratif. Sinergi kedua aktor tersebut menempatkan penanggulangan hoaks vaksinasi sebagai praktik konkret bela negara di era digital.

Kata kunci: bela negara, hoaks, vaksinasi, tenaga medis, digital

*Correspondence Address:	zelinda076@gmail.com
---------------------------------	--

Article History	Received	Revised	Published
	12 November	-	30 September 2026

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Kemudahan akses informasi di era perkembangan teknologi digital tidak hanya mempermudah komunikasi dan edukasi, tetapi juga membawa risiko serius berupa penyebaran hoaks secara masif di media sosial (Sarjito, 2024). Algoritma media sosial kerap tidak mempertimbangkan validitas informasi, sehingga berita palsu dapat menyebar hingga enam kali lebih cepat dibanding berita benar (Sarjito, 2021). Survei Telematika Mastel 2019 menunjukkan hoaks kesehatan sebagai kategori paling banyak (41,20%), diikuti hoaks teknologi (23,70%), yang menegaskan tingginya kerentanan isu kesehatan (Iswara et al., 2023). Hoaks dipahami sebagai informasi salah atau menyesatkan yang disebarkan untuk memengaruhi opini publik (Sarjito, 2024), dan dalam konteks kesehatan seperti pandemi COVID-19 peningkatan hoaks terbukti dapat menurunkan partisipasi vaksinasi serta mengancam keberhasilan kampanye kesehatan (Komala, 2021; Sarjito, 2024). Kondisi ini menjadikan literasi kesehatan dan literasi digital sangat krusial, sekaligus menempatkan tenaga medis sebagai aktor penting dalam menyediakan dan mengomunikasikan informasi ilmiah yang akurat kepada masyarakat (Anjelina et al., 2024; Astuti et al., 2024).

Kebijakan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yang memuat kewajiban vaksinasi sempat memicu pro dan kontra, karena sebagian masyarakat menilai kewajiban tersebut berpotensi bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Dalam kajian *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (PPKn), hoaks vaksinasi dipandang sebagai ancaman nirmiliter yang dapat melemahkan ketahanan nasional karena merusak kepercayaan terhadap negara, ilmu pengetahuan, dan institusi kesehatan (Hidayat *et al.*, 2021; Akbar *et al.*, 2024). Dalam kerangka ini, literasi digital warga negara meliputi kemampuan memverifikasi informasi, memahami regulasi ruang siber, dan menolak propaganda ditafsirkan sebagai bentuk aktualisasi bela negara di era digital untuk menjaga kedaulatan informasi dan stabilitas sosial-politik (Al Khansa *et al.*, 2024; Fitriani, 2023; Nasution & Harahap, 2021).

Salah satu aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah pelaksanaan usaha bela negara oleh setiap warga negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara” (Pemerintah Republik Indonesia, 1945), sedangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa bela negara merupakan sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan pada Pancasila dan UUD 1945 dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara (Pemerintah Republik Indonesia, 2002). Dengan demikian, bela negara tidak hanya dimaknai sebagai kesiapsiagaan militer, tetapi juga mencakup komitmen dan tanggung jawab warga negara untuk menjaga ketahanan nasional di berbagai bidang, termasuk kesehatan dan informasi, melalui partisipasi vaksinasi yang bertanggung jawab serta penolakan terhadap hoaks vaksinasi di ruang digital. Berdasarkan uraian tersebut, dalam perspektif *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hoaks vaksinasi sebagai ancaman nirmiliter terhadap ketahanan nasional, mengkaji bagaimana nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, serta hak dan kewajiban warga negara diaktualisasikan melalui peran tenaga medis dalam bela negara di ruang digital, serta mengevaluasi kontribusi kebijakan dan penegakan hukum pemerintah dalam menjaga kedaulatan informasi di era digital.

METODE | METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Kurniawansyah *et al.*, 2021). Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu mengungkap dan menjelaskan fenomena sosial yang bersifat kompleks serta kontekstual, seperti penyebaran hoaks kesehatan dan peran tenaga medis dalam menghadapi disinformasi di era digital. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam makna, konteks, serta strategi sosial yang muncul dalam dinamika masyarakat tanpa bergantung pada data numerik (Sugiyono, 2017). Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap berbagai sumber tertulis, seperti buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi dari instansi yang relevan dengan permasalahan penelitian (Kurniawansyah *et al.*, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

A. Bahaya penyebaran Informasi Hoaks

Penyebaran hoaks atau informasi palsu mengenai vaksin COVID-19 menjadi salah satu faktor yang menurunkan minat serta menimbulkan keraguan masyarakat untuk melakukan vaksinasi (Rahmawati *et al.*, 2022). Padahal, vaksinasi merupakan salah satu upaya pencegahan penyakit yang dilakukan dengan cara meningkatkan kekebalan tubuh agar seseorang lebih tahan terhadap infeksi virus atau bakteri (Hidayat *et al.*, 2022). Melalui vaksinasi, penyebaran penyakit dapat ditekan sehingga angka kesakitan dan kematian di masyarakat menurun. Vaksinasi juga berdampak pada bidang sosial dan ekonomi karena menjaga produktivitas masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan nasional di bidang kesehatan melalui diplomasi vaksin (Harizqi, 2022).

Pemerintah Indonesia sendiri telah menjalankan program vaksinasi COVID-19 untuk mengendalikan penularan, membentuk kekebalan kelompok, dan melindungi masyarakat dari dampak pandemi (Sutari *et al.*, 2022). Namun, pemerataan akses vaksin masih menjadi tantangan, terutama di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan (Sinuraya *et al.*, 2024). Program vaksinasi juga mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjamin hak kesehatan warganya sesuai dengan prinsip hukum internasional (Iskandar & Andaretna, 2021).

Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat literasi kesehatan masyarakat berperan besar dalam menentukan keberhasilan program vaksinasi nasional. Hoaks di bidang kesehatan tergolong berbahaya, terutama dalam situasi pandemi COVID-19 ketika masyarakat membutuhkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya (Syam *et al.*, 2024). Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa sebagian besar hoaks terkait vaksin COVID-19 tersebar melalui media sosial seperti Twitter, Facebook, dan WhatsApp, yang kerap menjadi sumber utama informasi masyarakat sehari-hari.

Penelitian yang dilakukan oleh (Islam *et al.*, 2021) menemukan bahwa penyebaran hoaks vaksin di media sosial berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya *vaccine hesitancy* atau keraguan terhadap vaksin di berbagai negara. Fenomena ini menunjukkan pentingnya upaya edukasi publik dan klarifikasi informasi untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk edukasi tentang hoaks dan fakta vaksin COVID-19 menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan vaksinasi nasional.

Indonesia termasuk negara yang sangat rentan terhadap penyebaran hoaks, terutama di masa pandemi COVID-19, karena lebih dari separuh penduduknya merupakan pengguna aktif internet (Tenriawali *et al.*, 2020). Arus informasi digital yang tidak terkontrol memicu disinformasi, kecemasan, dan keraguan terhadap vaksin (Wetik *et al.*, 2021). Bahkan sebelum vaksinasi Covid-19 dimulai, perdebatan di media sudah memunculkan pro dan kontra yang memengaruhi kepercayaan publik (Rachman & Pramana, 2020). Maraknya berita bohong memperburuk rendahnya minat vaksinasi (Hamdan & Putera, 2023). Oleh sebab itu, berbagai upaya edukasi dan klarifikasi publik perlu dilakukan, seperti kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada sosialisasi hoaks dan fakta vaksin COVID-19, agar masyarakat lebih bijak dalam menyaring informasi dan mendukung keberhasilan program vaksinasi nasional (Rahmawati *et al.*, 2022).

B. Upaya Bela Negara

Sebagai upaya bela negara, tenaga medis dapat melakukan beberapa hal untuk menghimbau masyarakat agar tidak langsung mempercayai hoaks terkait kesehatan, khususnya masalah vaksin yang beredar di berbagai media sosial, antara lain sebagai berikut:

1. Edukasi peningkatan literasi digital

Tenaga medis merupakan sumber utama yang terpercaya dalam memberikan informasi dan membenarkan isu-isu kesehatan yang beredar. Untuk mencegah terjadinya kasus dan penyebaran hoaks, tenaga medis berperan penting dalam mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan literasi digital. Literasi digital mencakup kemampuan memahami dan memanfaatkan informasi dari berbagai sumber yang tersedia melalui perangkat digital. Dengan kemampuan ini, individu dapat menilai, menganalisis, serta menggunakan informasi digital secara kritis dan bertanggung jawab, sehingga dapat turut berperan aktif dalam menciptakan lingkungan informasi yang sehat (Mashuri *et al.*, 2022 dalam (Prana & Sunarto, 2025)). Melalui penerapan literasi digital, masyarakat diharapkan dapat menampung dan menyaring informasi kesehatan dengan bijak, mencerna isu kesehatan yang beredar secara kritis, serta kebenaran sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi tersebut.

Selain itu, edukasi literasi digital yang dilakukan tenaga medis perlu dikemas dalam bentuk yang dekat dengan keseharian warga, seperti penyuluhan di fasilitas pelayanan kesehatan, kelas komunitas, webinar, dan konten edukatif di media sosial yang mengajarkan cara memeriksa kredibilitas sumber, mengenali akun resmi otoritas kesehatan, membandingkan informasi lintas platform, serta menggunakan fitur pelaporan hoaks (Prana & Sunarto, 2025; (E. N. Sari et al., 2021). Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan literasi digital berhubungan positif dengan kemampuan individu mencegah dan menyaring berita hoaks, termasuk isu kesehatan dan vaksinasi, karena mereka lebih kritis terhadap judul provokatif, lebih sering memeriksa kembali fakta, dan cenderung tidak langsung membagikan informasi yang belum terverifikasi (Bin Naeem & Kamel Boulos, 2021; Pratama et al., 2022; (Vrdelja et al., 2021). Dengan demikian, setiap interaksi tenaga medis dengan pasien—misalnya saat konsultasi vaksinasi—dapat dimanfaatkan sebagai titik masuk untuk melatih keterampilan verifikasi sederhana terhadap pesan berantai yang diterima masyarakat (Mashuri *et al.*, 2022 dalam Prana & Sunarto, 2025).

Lebih jauh, program literasi digital yang dipimpin tenaga medis dapat diposisikan sebagai bagian dari penguatan ketahanan nasional di bidang informasi dan kesehatan, karena membentuk warga yang tidak mudah terpolarisasi oleh hoaks vaksinasi dan lebih percaya pada kanal resmi negara (Hidayat *et al.*, 2021). Kajian naratif tentang misinformasi kesehatan di media sosial menegaskan bahwa intervensi paling efektif adalah kombinasi antara edukasi literasi digital kesehatan, dukungan komunitas, dan kemitraan erat antara tenaga kesehatan, institusi pendidikan, dan pembuat kebijakan untuk membangun resiliensi masyarakat terhadap infodemi (Bin Naeem & Kamel Boulos, 2021; (Nugrahani, 2022). Dengan demikian, ketika tenaga medis secara sistematis membekali masyarakat dengan kompetensi literasi digital kesehatan dan mendorong praktik verifikasi sebelum berbagi informasi, mereka tidak hanya menjalankan fungsi klinis, tetapi juga menjalankan peran strategis sebagai pelaksana bela negara yang menjaga kedaulatan informasi dan keberhasilan program vaksinasi.

2. Promosi kesehatan melalui berbagai platform media sosial

Hoaks bukan sekadar kesalahan informasi, dalam konteks ketahanan nasional, hoaks berpotensi menjadi alat yang melemahkan kohesi sosial dan mengganggu stabilitas politik, karena mampu memprovokasi ketakutan, konflik, serta disinformasi massal yang menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Studi menunjukkan bahwa penyebaran berita hoaks melalui media sosial telah menimbulkan dampak nyata terhadap keamanan publik dan proses politik di Indonesia, sehingga penanganannya harus dipandang sebagai bagian dari upaya bela negara, bukan semata-mata masalah komunikasi pribadi (Lemhannas RI, 2022; (N. Sari & Putra, 2023).

Upaya mengatasi hoaks perlu menggabungkan penguatan literasi digital, pelibatan aktor lokal seperti sekolah dan tokoh masyarakat, serta kerja sama dengan platform digital dan lembaga verifikasi fakta. Peningkatan kemampuan verifikasi sumber, pemahaman mekanisme penyebaran informasi, dan etika bermedia terbukti menurunkan kecenderungan masyarakat mempercayai hoaks. Integrasi nilai bela negara dalam literasi digital juga dapat memperkuat motivasi masyarakat menjaga keamanan nasional (Fitriani, 2023; Nasution & Harahap, 2021; (Rahman, 2022).

Secara operasional, promosi anti hoaks dapat dilakukan melalui kampanye edukasi lintas platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, pelatihan “bela negara digital” untuk pelajar dan mahasiswa, serta kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan lembaga cek fakta. Program berbasis edukasi dan komunitas terbukti lebih efektif menekan peredaran hoaks dibandingkan pendekatan tunggal (Fauziah, 2022; (Lubis et al., 2023). Dengan demikian, promosi

digital anti hoaks menjadi bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam bela negara era digital.

3. Melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak

Ketahanan nasional di era digital menghadapi tantangan serius akibat meningkatnya penyebaran hoaks dan disinformasi di ruang publik. Dalam menghadapi situasi ini, diperlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, tenaga medis, masyarakat, hingga perusahaan teknologi (Sarjito, 2024). Pemerintah berperan penting dalam menyusun kebijakan komunikasi publik yang transparan serta menegakkan regulasi terhadap penyebaran berita palsu di ruang digital. Regulasi yang tegas dan koordinasi antar lembaga dapat memperkuat upaya mitigasi penyebaran informasi palsu yang berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara (Rohman & Yulianto, 2023). Selain itu, organisasi profesi dan lembaga pendidikan dapat mendukung kampanye literasi digital melalui edukasi masyarakat agar mampu mengenali, memverifikasi, dan menolak hoaks kesehatan (Fitriyani & Arifin, 2021).

Tenaga medis memiliki peran strategis dalam kolaborasi ini karena menjadi sumber informasi kesehatan yang kredibel dan dipercaya publik. Mereka perlu bekerja sama dengan pemerintah, institusi kesehatan, dan dukungan teknologi digital untuk memperluas edukasi serta meningkatkan literasi kesehatan masyarakat (Hutagalung *et al.*, 2024). Kolaborasi dengan perusahaan teknologi juga penting untuk mengembangkan sistem verifikasi otomatis berbasis kecerdasan buatan guna mendeteksi konten berpotensi menyesatkan sebelum menyebar luas (Mahardika & Pratiwi, 2022). Di sisi lain, masyarakat sebagai pengguna media digital harus dilibatkan secara aktif melalui program literasi digital yang berkelanjutan agar memiliki kesadaran kritis terhadap informasi yang diterima (Nugroho *et al.*, 2023). Sinergi antaraktor ini merupakan fondasi penting dalam memperkuat ketahanan nasional terhadap ancaman nirmiliter di era digital.

4. Kontribusi pemerintah dalam menindaklanjuti hoaks

Pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial memperbesar kejadian penyebaran hoaks kesehatan, khususnya vaksinasi di Indonesia yang dapat menyebabkan kerugian sosial maupun politik (A. P. Sari & Yulianita, 2023). Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pengawasan dan pengendalian informasi secara sistematis. Upaya penindakan telah dilakukan melalui UU ITE dengan ancaman pidana hingga enam tahun penjara dan denda satu miliar rupiah bagi penyebar hoaks (Wibowo & Sudarto, 2025; (Zulfan *et al.*, 2020), serta dukungan KUHP Pasal 14 dan 15. Selain itu, juga dapat dilakukan langkah preventif dengan pemblokiran situs hoaks dan penguatan keamanan siber oleh BSSN.

Selain sanksi pidana, pemerintah menerapkan sanksi administratif kepada platform digital yang tidak menurunkan konten hoaks sesuai PP No. 71 Tahun 2019 (Athifahputih, 2022). Pendekatan ini memperlihatkan sinergi antara hukum pidana dan administrasi untuk menjaga ketertiban ruang digital. Dari sisi filosofi hukum, pendekatan *Restorative Justice* dinilai lebih humanis dan selaras dengan nilai Pancasila karena mengedepankan edukasi serta pemulihan sosial (Lazuardi, 2020).

Secara normatif, penegakan UU ITE sebagai *lex specialis* diperkuat melalui kerja sama aparat penegak hukum dan Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui tiga langkah, yaitu *pre-emptif* (edukasi), *preventif* (pemantauan dan pemblokiran konten), dan *represif* (penegakan hukum) (Muharrir *et al.*, 2024). Pendekatan berlapis ini menunjukkan bahwa penanganan hoaks tidak hanya soal hukum pidana, tetapi juga berkaitan dengan literasi digital, kebijakan publik, dan etika bermedia. Oleh karena itu, pemberantasan hoaks memerlukan keseimbangan antara ketegasan hukum, keadilan sosial, dan edukasi masyarakat.

KESIMPULAN | CONCLUSION

Hoaks vaksinasi di era digital tidak hanya menghambat keberhasilan program imunisasi dan menurunkan literasi kesehatan masyarakat, tetapi juga merupakan ancaman nirmiliter yang melemahkan kepercayaan publik serta ketahanan nasional sehingga perlu diposisikan sebagai bagian dari agenda bela negara di bidang kesehatan dan informasi. Dalam kerangka tersebut, tenaga medis berperan sebagai garda terdepan melalui edukasi berbasis bukti, penguatan literasi kesehatan dan literasi digital, promosi kesehatan lintas platform, serta klarifikasi sistematis terhadap disinformasi yang beredar. Pada saat yang sama, pemerintah berkewajiban menjamin hak atas kesehatan dan ketertiban ruang digital melalui kebijakan vaksinasi yang transparan, penegakan regulasi (UU ITE, KUHP, sanksi pidana dan administratif), penguatan keamanan siber, serta langkah pre-emptif, preventif, dan represif yang selaras dengan prinsip *restorative justice*. Sinergi antara otoritas keilmuan tenaga medis, instrumen hukum dan kebijakan negara, serta partisipasi aktif warga negara menjadi fondasi untuk melawan hoaks vaksinasi sekaligus mewujudkan praktik bela negara yang konkret dalam memperkuat ketahanan nasional di era digital.

UCAPAN TERIMA KASIH | THANK-YOU NOTE

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Mataram yang telah memberikan dukungan akademik dan fasilitas selama proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta pihak-pihak yang telah memberikan saran, masukan, dan penguatan konseptual terkait isu bela negara, literasi digital, dan hoaks vaksinasi. Penulis juga menghargai kontribusi para tenaga medis dan lembaga terkait yang menjadi rujukan dalam kajian literatur, serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada editor dan mitra bestari SALUT: Journal of Social and Education atas telaah dan komentar konstruktif yang sangat membantu penyempurnaan artikel ini.

REFERENSI | REFERENCE

- Akbar, R. S., Iskandar, T., Abadi, M. D., Bachtiar, S., Khomaidi, M. I., Damayanti, T. O., & Renhard, R. (2024). Memperkuat ketahanan nasional: Aktualisasi bela negara melalui literasi digital. *Journal on Education*, 6(4), 18838–18849.
- Al Khansa, J. N., Maiyuni, N. A. I., Azzahroh, N. I., Shandiva, C. N., Aini, A. N., & Ghazali, I. (2024). Citizenship education in the post-truth era: Removing disinformation and hoaxes. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 231–253.
- Anjelia, M., Thamrin, T., & Pratama, R. (2024). The role of Indonesian doctors as content creators in fighting health hoaxes, myths and stigma on social media. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 13(2), 291–321. <https://doi.org/10.7454/jki.v13i2.4212>
- Astuti, S., Aisyah, P., Rochadi, R., & Sari, E. (2024). Lessons from Indonesia: Centre health workers to fight health misinformation online. *The BMJ*, q82. <https://doi.org/10.1136/bmj.q82>
- Athifahputih, P. Y. R. (2022). Penegakan hukum terhadap penyebaran berita hoax di lihat dari tinjauan hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 64–69. Universitas Sebelas Maret. <https://jurnal.uns.ac.id/jhpe>
- Bin Naeem, S., & Kamel Boulos, M. N. (2021). COVID-19 misinformation online and health literacy: A brief overview. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(15), 8091. <https://doi.org/10.3390/ijerph18158091>
- Fauziah, R. (2022). Strategi pemerintah dalam menangkal hoaks di era digital. *Jurnal Ilmiah Komunikasi Indonesia*, 9(1), 44–55. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/1878>
- Fitriani, D. (2023). Penguatan literasi digital berbasis nilai bela negara di kalangan mahasiswa. *Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Antasari*, 5(2), 88–99. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jki/article/view/3112>

- Fitriyani, D., & Arifin, R. (2021). Peran literasi digital dalam menangkal hoaks kesehatan di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Media Digital*, 6(2), 145–158.
- Hamdan, H., & Putera, R. E. (2023). Kebijakan vaksinasi COVID-19 di Indonesia: Sebuah upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk divaksin. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 5(1). <https://doi.org/10.20527/jpp.v5i1.6940>
- Harizqi, D. (2022). Analisis strategi diplomasi vaksin multijalur Indonesia dalam upaya mengatasi pandemi COVID-19 (2020–2021). *LINO: Journal of International Relations*, 2(2), 105–120.
- Hidayat, A., Anam, S., & Munir, A. M. (2022). Diplomasi vaksin: Strategi Indonesia dalam memperkuat keamanan kesehatan nasional di tengah pandemi Covid-19. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 4(1), 17–34. <https://doi.org/10.29303/ijgd.v4i1.44>
- Hidayat, N., Widyaningrum, N., & Sarjito, A. (2021). Literasi digital dan bela negara: Sebuah upaya untuk mencegah hoax dalam sistem pertahanan negara. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(1), 32–41.
- Hutagalung, R., Siregar, F., & Lubis, A. (2024). Peran tenaga medis dalam mitigasi hoaks kesehatan di era digital. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 19(1), 33–42.
- Iskandar, Y. P., & Andaretna, L. M. (2021). Mandatory COVID-19 vaccination programme in Indonesia under international human rights law: A legitimate limitation? In *Proceedings of the 2nd International Conference on Law and Human Rights (ICLHR 2021)* (pp. 60–70). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211112.008>
- Islam, M. S., Kamal, A. H. M., Kabir, A., Southern, D. L., Khan, S. H., Hasan, S. M. M., et al. (2021). COVID-19 vaccine rumors and conspiracy theories: The need for cognitive inoculation against misinformation to improve vaccine adherence. *PLOS ONE*, 16(5), e0251605.
- Iswara, F., Susana, R., & Martarini, N. (2023). Analisis hoaks yang dipublikasikan berulang. *Jurnal Pekommas*, 8(1), 87–94. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2023.8.1.541>
- Komala, R. (2021). Analisis risiko penyebaran berita hoaks COVID-19 dan literasi kesehatan masyarakat. *Jurnal Dinamika, Universitas Muhammadiyah Tangerang*, 7(1), 1–19. <https://doi.org/10.46445/jd.v7i1.2184>
- Kurniawansyah, E., Fauzan, A., & Tamalasari, E. (2021). Implikasi pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga di Sumbawa. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(1).
- Lazuardi, G. (2020). Pendekatan restorative justice dalam tindak pelaku penyebaran hoaks. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(9). <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i09.p01>
- Lemhannas RI. (2022). Dampak hoaks terhadap ketahanan nasional dan upaya penanggulangannya. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(3), 120–132. <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkn/article/view/142>
- Lubis, H., Nasution, R., & Siregar, A. (2023). Peran literasi digital dalam mencegah penyebaran berita hoaks di media sosial. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan*, 11(1), 35–47. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/2039>
- Mahardika, D., & Pratiwi, E. (2022). Kolaborasi lintas sektor dalam pengendalian disinformasi digital di Indonesia. *Jurnal Teknologi dan Informasi Sosial*, 5(3), 211–224.
- Mashuri, C., Permadi, G. S., Vitadiar, T. Z., Mujiyanto, A. H., Cakra, R., Faizah, A., & Kistofer, T. (2022). *Buku 10 Ajar: Literasi Digital*. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Muharrir, M., Moulia, N., Jalaluddin, Zulfikar, M. N., Adabi, M. I., & Ridha, I. (2024). Bahaya penyebaran informasi hoaks dan antisipasinya. *Lok Seva: Journal of Contemporary Community Service*, 3(2), 63–67.
- Nasution, A., & Harahap, S. (2021). Literasi digital sebagai bentuk bela negara di era disinformasi. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 3(2), 101–113. <https://jurnal.universitaslia.ac.id/index.php/jkn/article/view/1127>

- Nugrahani, M. R. (2022). Social media, health misinformation, and literacy: A narrative review of challenges and solutions. *Journal of Health Literacy and Qualitative Research*, 2(2). <https://doi.org/10.61194/jhlqr.v2i2.545>
- Nugroho, L., Hidayah, N., & Prasetyo, A. (2023). Strategi komunikasi kolaboratif tenaga kesehatan dalam peningkatan literasi masyarakat terhadap isu vaksinasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi Kesehatan*, 8(1), 25–37.
- Prana, K., & Sunarto, S. (2025a). Pengaruh terpaan konten hoaks isu kesehatan di media sosial dan tingkat literasi digital masyarakat terhadap tingkat kepercayaan masyarakat menggunakan Facebook. *Interaksi Online*, 13(2), 1–10.
- Prana, K., & Sunarto, S. (2025b). Pengaruh terpaan konten hoaks isu kesehatan di media sosial, tingkat literasi digital dan tingkat kecemasan terhadap perilaku pencegahan Covid-19. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1), 62–78.
- Pratama, F. R., Budiono, S. S., & Winoto, Y. (2022). Hubungan antara kemampuan literasi digital dengan pencegahan berita hoaks di kalangan mahasiswa. *Informatio: Journal of Library and Information Science*, 2(3), 165–184.
- Rachman, F. F., & Pramana, S. (2020). Analisis sentimen pro dan kontra masyarakat Indonesia tentang vaksin COVID-19 pada media sosial Twitter. *Inohim*, 8(2), 100–109. <https://doi.org/10.47007/INOHIM.V8I2.223>
- Rahman, F. (2022). Implementasi pendidikan literasi digital dalam menumbuhkan sikap bela negara di kalangan remaja. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 7(1), 56–65. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jpendtek/article/view/2976>
- Rahmawati, C., Nopitasari, B. L., Wardani, A. K., Nurbaety, B., Hati, M. P., Anjani, B. L. P., Furqani, N., & Wahid, A. (2022). Pembuatan video edukasi: Berantas hoaks seputar vaksin COVID-19 di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Mataram. *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(3). <https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i3.7086>
- Rohman, M., & Yulianto, T. (2023). Kebijakan publik dan peran pemerintah dalam menangkal disinformasi kesehatan di media sosial. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 12(4), 501–515.
- Sari, A. P., & Yulianita, N. (2023). Media Tracking Jabar Saber Hoaks sebagai upaya mengendalikan hoaks. *Bandung Conference Series: Public Relations*. <https://doi.org/10.29313/bcspr.v3i1.6755>
- Sari, E. N., Hermayanti, A., Rachman, N. D., & Faizi, F. (2021). Peran literasi digital dalam menangkal hoax di masa pandemi (literature review). *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 13(3), 225–241. <https://doi.org/10.52166/madani.v13i03.2799>
- Sari, N., & Putra, D. (2023). Hoaks sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial politik di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 8(2), 70–82. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JAIH/article/view/2107>
- Sarjito, A. (2021). Hoaks, disinformasi, dan ketahanan nasional: Ancaman teknologi informasi dalam masyarakat digital Indonesia. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 5(2), 175–186.
- Sarjito, A. (2024). Hoaks, disinformasi, dan ketahanan nasional: Ancaman teknologi informasi dalam masyarakat digital Indonesia. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 6(2), 175–186. <https://doi.org/10.37304/jglp.v6i2.664>
- Sinuraya, R. K., Postma, M. J., Suwantika, A. A., & Nuwarda, R. F. (2024). Vaccine hesitancy and equity: Lessons learned from the past and how they affect the COVID-19 countermeasure in Indonesia. *Globalization and Health*, 20(11). <https://doi.org/10.1186/s12992-023-00987-w>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- Sutari, S., Idris, H., & Misnaniarti, M. (2022). Implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 di Indonesia: Narrative review. *Riset Informasi Kesehatan*, 11(1), 71–81. <https://doi.org/10.30644/rik.v11i1.637>
- Syam, R., Sanusi, W., & Syahnur, A. A. (2024). Deteksi informasi hoaks vaksin COVID-19 di media sosial Twitter menggunakan jaringan syaraf tiruan backpropagation. *Journal of Mathematics, Computations and Statistics*, 7(2). <https://doi.org/10.35580/jmathcos.v7i2.4433>
- Tenriawali, A., Suryani, S., Hajar, I., & Umanailo, M. C. B. (2020). Efek hoax COVID-19 bagi iGeneration di Kabupaten Buru. *Potret Pemikiran*, 24(2). <https://doi.org/10.30984/PP.V24I2.1201>
- Vrdelja, M., Vrbovšek, S., Klopčič, V., Dadaczynski, K., & Okan, O. (2021). Facing the growing COVID-19 infodemic: Digital health literacy and information-seeking behaviour of university students in Slovenia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(16), 8507. <https://doi.org/10.3390/ijerph18168507>
- Wetik, S., Polii, B. G., & Lumowa, N. F. (2021). Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial (DKJPS) COVID-19 pada masyarakat kategori “orang sehat” di Desa Seretan Kecamatan Lembean Timur, Sulawesi Utara. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1). <https://doi.org/10.33024/JKPM.V4I1.3247>
- Wibowo, D. P., & Sudarto. (2025). Akibat hukum bagi pelaku penyebaran informasi palsu (hoax) berdasarkan UU ITE. *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(1), 45–59. <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexlaguens>
- Zulfan, Z., Lestari, A. K. A., & Sari, D. M. (2020). Efektivitas penerapan Undang-Undang ITE terhadap pelaku penyebaran hoaks terkait COVID-19 di media sosial. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 10(2), 198–211. <http://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/view/164>